

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PETANI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
TAHUN 2016-2019**

Oleh : Desti Milsy Anggraini

Email : desti.tt788@gmail.com

Dosen Pembimbing : Zulfa Harirah MS, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Indragiri Hilir Regency is an area that has palntations wide coconut area with 302.774 Area (Ha) and 317.117 tons of production coconut. So it is not suprising that almost 70% of the people Indragiri Hilir Regency make a living as coconut farmers. However, there is no guarantee the welfare of coconut farmers in Indragiri Hilir Regency because of the presence of problems that result in a decrease in the level of welfare coconut farmers in Indragiri Hilir Regency. Where is the rate drop the welfare of coconut farmers is caused by the problems that are found in the value chain of coconut production in Indragiri Hilir Regency. Therefore, this research was conducted to find out how the Local Government is improving the welfare of coconut farmers through the calue chain of coconut production in Indragiri Hilir Regency and what are the factors an obstacle to the efforts of the regional Government in improving the welfare of farmers coconut in Indragiri Hilir Regency. This research was conducted using a qualitative research approach with the type of descriptive research. With data collection techniques through interviews and documentation.

The result of this study indicate that the government's efforts in improving the welfare of coconut farmers through the production value chain coconut in Indragiri Hilir Regency include: 1) Government's efforts as a regulator of the input-output structure which is carried out by establishing regulations relating to the problems of the input-output stucture that can be resulting in a decrease in the level of welfare of coconut farmers, 2) government efforts as Upgrading Facilitator, which is done by making dike and normalization of smallholder coconut plantation ditches, plantation rejuvenation community coconut, coconut production processing, and training of coconut farmers, 3) Government efforts as Facilitator of value chain breaking collectors (tauke) which is done by establishing and utilizing Bumdes in every village in Indragiri Hilir Regency, and 4) Government Efforts as a stakeholder dynamism carried out by conducting socialization, deliberation and cooperating with stakeholders to encourage the contribution of parties involved in a coconut production value chain to increase welfare of coconut farmers. While the inhibiting factors contained in local government efforts in improving the welfare of coconut farmers, namely : contained in the lack of budget, lack of human resources, and limited facilities and infrastucture. .

Keywords : Local Government, Welfare, Coconut Farmers.

Pendahuluan

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dilimpahkan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk mengelola serta menggali hasil sumber daya alam yang ada di daerahnya.

Hal ini selaras dengan Pasal 1 Ayat 12 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam hal ini Arenawati menyebutkan dalam bukunya bahwa Pemerintah Daerah otonom adalah pemerintah daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional (Arenawati, 2013).

Terkait dengan daerah otonom Rasyid dalam bukunya yang berjudul “otonomi daerah dalam negara kesatuan” menyebutkan bahwa daerah otonom berperan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dari segi keuangan” (Hamdani, 2018). Mengenai hal ini dapat kita lihat begitu pentingnya peran daerah otonom dalam meningkatkan potensi yang ada di wilayah kabupaten, provinsi Riau.

Salah satunya yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dimana Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah yang memiliki potensi perkebunan kelapa terbesar di Indonesia dengan 302.774 hektar areal pekebunan kelapa dan 317.117 ton produksi kelapa

pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik 2020). Sehingga tidak heran jika mayoritas masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir menggantungkan perekonomian mereka dari hasil perkebunan kelapa.

Dimana Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat berperan penting terhadap perekonomian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan penghasilan dari masyarakat dan daerah, karena kelapa bagi masyarakat merupakan penyedia lapangan kerja, sumber bahan baku bagi industri makanan dan minuman serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir No.3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa). Adapun tujuan dari penyelenggaraan perkebunan terdapat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
- b. Meningkatkan sumber devisa negara
- c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar.
- e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri
- f. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat
- g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan
- h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. (Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan)

Namun, makin hari harga komoditas hasil perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan yang berdampak pada

Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya kesejahteraan Petani Kelapa karena hampir 70% mata pencaharian masyarakat kabupaten Indragiri Hilir adalah petani kelapa. Para petani kelapa menjerit dan mengeluh dengan harga kelapa yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka, karena saat harga kelapa turun maka perekonomian di Indragiri Hilir otomatis akan ikut turun hal ini juga berpengaruh terhadap pendidikan anak para petani kelapa yang harus terancam berhenti sekolah karena kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan juga banyak petani kelapa yang terlilit hutang karena tidak ada modal untuk memperbaiki perkebunan kelapa mereka. Dan adapun tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Indikator Nilai Tukar Petani. Dimana Nilai Tukar Petani adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam presentase, yang mana nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani. Dan adapun nilai tukar petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Nilai Tukar Petani Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2019

| Rincian | Rata-Rata Nilai Tukar Petani |
|---------|------------------------------|
| 2016 | 97,27 |
| 2017 | 104,48 |
| 2018 | 95,57 |
| 2019 | 92,31 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tukar petani pada tahun 2018 mengalami surplus atau bisa dikatakan nilai tukar petani lebih dari 100, sehingga ini menandakan bahwa petani mengalami kesejahteraan, sedangkan pada tahun 2016, 2017, dan 2019 nilai tukar petani Kabupaten Indragiri Hilir mengalami defisit atau kurang dari 100, sehingga bisa

dikatakan bahwa petani di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan belum sejahtera.

Dan Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah di sebabkan oleh permasalahan dalam rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Indragiri Hilir, yaitu sebagai berikut:

a. Petani

Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan aktor yang berada di rantai nilai paling awal yang menyediakan kelapa yang nantinya akan dijual kepada pedagang pengumpul (tauke). Dalam produksi Kelapa, rantai nilai petani di Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat banyak permasalahan mengenai produksi/kualitas kelapa yang diberikan petani. Karena kualitas produk kelapa merupakan penentu untuk penetapan harga kelapa yang berdampak pada tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. seperti: banyaknya pohon kelapa yang rusak, masih banyaknya kelapa yang kecil serta banyaknya pohon kelapa yang tua.

Permasalahan kualitas kelapa ini disebabkan karena harga produksi pupuk yang mahal sehingga menyebabkan petani malas dan jarang memupuk tanaman kelapa mereka, kurangnya teknik keterampilan dalam budidaya perkebunan kelapa yang dilakukan oleh petani kelapa sehingga budidaya kelapa yang dilakukan petani umumnya tidak sesuai dengan prosedur atau cara yang seharusnya digunakan dan ini disebabkan karena kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para petani kelapa, sehingga dalam melakukan budidaya perkebunan kelapa, petani hanya mengandalkan pengetahuan yang terbatas dan berdasarkan atas kemampuannya saja.

Permasalahan lainnya juga terdapat pada permasalahan modal yang memang terbatas pada petani sehingga menghambat usaha tani yang

dijalankannya, dan para petani juga dalam memelihara perkebunan kelapa masih menggunakan cara tradisional dikarenakan kurangnya pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan mereka dalam memelihara perkebunan kelapa mereka, kerusakan kelapa juga terjadi akibat intuisi air laut serta ledakan populasi hama seperti kumbang tanduk dan hama nifah yang menyerang perkebunan kelapa milik petani Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Pedagang Pengumpul (Tauke)

Pada proses produksi rantai nilai Pedagang pengumpul (Tauke) merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan. Dimana sebelum kelapa diberikan ke perusahaan harus melalui tauke terlebih dahulu (perantara). Maksudnya, petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan hasil perkebunan kelapa mereka kepada pedagang pengumpul dalam bentuk bulat dan kemudian akan di sortir oleh tauke dalam bentuk kelapa bulat pula kepada perusahaan. Kegiatan sortir ini akan merugikan petani, dimana dalam kegiatan sortir ini akan diambil kelapa yang memang memenuhi standarisasi saja dan akan menetapkan harga yang rendah untuk kelapa yang tidak memenuhi standarisasi mereka. Dalam kegiatan rantai nilai produksi yang terjadi pada pedagang pengumpul (tauke) juga terdapat permasalahan. Permasalahan yang terdapat adalah dimana tauke memberikan harga yang lebih rendah daripada perusahaan serta terjadinya monopoli harga (penentuan harga sendiri) atau monopoli harga yang dilakukan oleh tauke kepada petani dan berpengaruh kepada harga kelapa yang diterima oleh petani kelapa sehingga berdampak terhadap pendapatan petani kelapa yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini diakibatkan oleh adanya kontrak yang dijalin antara petani dan pedagang pengumpul (tauke) di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana petani meminjam uang (Panjar) kepada tauke. Kontrak

tersebut terjadi karena kurangnya modal yang dimiliki petani untuk mengelola atau pun merawat perkebunan kelapa mereka sehingga dilakukanlah peminjaman modal oleh petani kepada pedagang pengumpul (tauke) dan terjadilah kesepakatan diantara mereka. Hal ini menyebabkan pedagang pengumpul (tauke) memberikan harga yang rendah kepada petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dan dengan adanya kontrak ini petani kelapa tidak dapat menjual kelapa mereka ke tauke yang lain dikarenakan kontrak yang telah terjalin, dan ini semua lepas dari pengawasan pemerintah daerah.

Selain itu, dalam rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Pemerintah juga ikut berperan serta didalamnya yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang menghasilkan upaya terhadap permasalahan yang terdapat didalam rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, dalam upaya pemerintah daerah ini terdapat permasalahan yaitu, belum adanya penetapan harga atau jaminan harga kelapa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petani kelapa, pelaksanaan upaya pemerintah terhadap bidang perkebunan khususnya sebagai perbaikan ekonomi masyarakat petani yang dijanjikan direalisasikan masih tersendat-sendat seperti : sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perkebunan kelapa rakyat dan pengolahan kelapa rakyat masih kurang, subsidi pupuk yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum merata, serta minimnya sumber daya pendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir seperti anggaran/dana dan sumber daya manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja Faktor Penghambat yang terdapat di dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah daerah yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terdapat di dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kerangka Teori

A. Global Value Chain

Global Value Chain adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau orang-orang yang terlibat di dalam rantai nilai, baik dari proses awal produksi hingga sampai pada tahap akhir yaitu pendistribusian produk ke konsumen.

Meine Pieter Van Dijk dan Jacques Trienekens mengemukakan pendapatnya yang tertulis dalam bukunya yang berjudul “*Global value chains linking local producers from developing countries to international markets*” menyebutkan bahwa rantai nilai global merupakan bagaimana cara menghubungkan antara produsen lokal dari negara berkembang dan pasar internasional, baik dari produksi awal hingga produk sampai ke tangan konsumen dan juga menjelaskan siapa siapa saja atau organisasi apa saja yang berperan didalam rantai nilai global tersebut (Trienekens, 2012).

Dalam hal ini Johansson juga menyebutkan bahwa global value chain merupakan salah satu faktor yang menentukan tentang bagaimana

perdagangan internasional serta kaitannya erat dengan kegiatan ekspor dan impor negara (di lihat di Kholis Kurniawan, 2017). Dalam hal ini kaitan antara global value chain dengan perdagangan internasional serta ekspor dan impor negara adalah bagaimana dalam proses rantai nilai global ini semua pihak yang terlibat saling bekerja sama untuk meningkatkan produksinya agar dapat bersaing di pasar internasional.

a. Rantai Nilai

Rantai nilai merupakan rangkaian lengkap kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam rantai nilai seperti perusahaan dan pekerja untuk menghasilkan produk yang nantinya akan di distribusikan kepada konsumen.

Pengertian rantai nilai menurut Kaplinsky merupakan kegiatan dalam proses produksi suatu barang dan jasa melalui pihak-pihak yang terlibat seperti : produsen utama, pengelola, pedagang dan konsumen yang membuat bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Selain itu, Kaplinsky dan Morris juga menyebutkan bahwa rantai nilai merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari penentuan konsep hingga melalui berbagai tahapan produksi yang didalam rangkaian kegiatan tersebut terdapat campur tangan antar pihak yang terlibat didalam rantai nilai hingga sampai pada proses pengiriman akhir yaitu konsumen (Trienekens, 2012).

Agar menyebutkan bahwa rantai nilai merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai kegiatan terkait tahapan penyediaan jasa, perakitan, pengelolaan hingga produk tersebut layak di distribusikan ke pasaran. Dalam bukunya yang berjudul “*Global Value Chain Analysis A Primer*” Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark juga menyebutkan bahwa rantai nilai merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pekerja untuk menghasilkan suatu produk yang akan di distribusikan sampai ke tangan konsumen, dimana kegiatan dalam rantai nilai ini meliputi desain,

produksi, distribusi dan pemasaran produk hingga sampai ketangan konsumen.

Garry Gereffi & Karina Fernandez-Strak juga mengemukakan bahwa ada enam dimensi dalam mengembangkan metodologi *Global Value Chain* yaitu :

- *Input-output structure of a GVC*

Struktur input dan output dalam rantai mewakili seluruh proses yang membawa produk dari tahap awal hingga ke tangan konsumen. Tahap utama dalam hal ini biasanya meliputi : penelitian dan desain, input, produksi, distribusi, dan pemasaran hingga penjualan. Struktur input-output melibatkan barang dan jasa dalam proses nya. Struktur Input dan Output biasanya di representasikan sebagai satu set rantai nilai kotak yang dihubungkan oleh panah, dimana panah tersebut menunjukkan aliran dalam tahapan struktur input-output dalam suatu layanan. Serta dalam struktur ini memuat tentang informasi yang menarik bagi peneliti.

- *Geographic Scope*

Analisis geografi pertama kali dianalisis pada penawaran dan permintaan global. Dengan cara menganalisis arus perdagangan dalam setiap rantai nilai menggunakan statistik dalam perdagangan internasional yang informasinya di kumpulan dari sumber-sumber data perusahaan, publikasi industri dan wawancara dengan pakar industri.

Salah satu kontribusi utama analisis GVC yaitu memetakan pergerasan dalam cakupan geografis industri global. Dimana GVC dalam skala geografis menunjukkan perbedaan antara lokal, nasional, regional dan global.

- *Governance Structure : lead Firms & Industry Organization*

Analisis tata kelola memungkinkan seseorang mengetahui kapan bagaimana suatu rantai dapat dikendalikan dan dikoordinasikan oleh aktor yang memiliki kekuatan lebih dari yang lain. *Governance* dalam *global value chain* digambarkan sebagai sebuah hubungan aktor-aktor yang terlibat didalam suatu rantai nilai, dimana

dalam hal ini ada aktor yang lebih dominan dan mempunyai fungsi dalam mengontrol dan menentukan informasi dalam berlangsungnya proses yang terjadi didalam suatu rantai nilai. Pemerintah secara konstitusional memiliki peran dan kekuasaan untuk mempengaruhi, menekan pihak lain yang terlibat didalam sebuah rantai nilai. *Governance* didalam GVC memiliki 5 struktur yaitu : pasar, modular, relasional, captive, dan hierarki.

- *Upgrading*

Upgrading merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk menginovasi suatu produk, menambah suatu nilai produk, upaya untuk meningkatkan produk serta meningkatkan keahlian dan keterampilan yang lebih baik. kegiatan upgrading dilakukan melalui campur tangan kebijakan pemerintah, institusi, strategi perusahaan dan keterampilan pekerja dikaitkan dengan peningkatan keberhasilan.

- *Local Institutional Context*

Kerangka kerja kelembagaan lokal mengidentifikasi bagaimana kondisi antara lokal, nasional dan internasional serta bagaimana kebijakan dalam membentuk partisipasi negara di setiap tahapan rantai nilai.

- *Industry Stakeholders.*

Analisis dinamika lokal dimana pada industry stakeholders ini menganalisis dan memeriksa semua pihak yang terlibat didalam tahapan rantai nilai ini. Dan menjelaskan bagaimana hubungan para aktor yang terlibat didalam rantai nilai agar dapat mendorong perubahan. Serta kontribusi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat untuk mendorong pembangunan dan produktivitas didalam tahapan rantai nilai tersebut. (Stark, *Global Value Chains Analysis : A Primer 2nd Edition*).

B. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah secara umum menurut Kuncoro meliputi peran minimal, peran antara dan peran aktif. Peran minimal dapat dilakukan dengan cara menyediakan kebutuhan publik,

manajemen, pertahanan, keamanan, ekonomi dan penyedia fasilitas kesehatan. Peran antara, dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengaturan kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Yang terakhir peran atif yang merupakan koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif (Kuncoro, 2004). Yang mana menurut Soekanto peranan pemerintah mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat orang di masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto S. , 2012).

Dan dalam hal ini Okke Rosmaladewi mengemukakan mengenai tiga peran yang harus dimiliki oleh pemerintah yaitu :

1. Pemerintah Sebagai Regulator.

Pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin operasional dan mempunyai kewenangan dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut. Dimana pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan. Dimana Pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan arahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah

melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan serta menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. pemerintah dalam hal ini berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, aman dan nyaman. Serta menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik itu berupa bangunan, permodalan, pendanaan dan pendampingan. (Rosmaladewi, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil dan Pembahasan

Uraian dalam pembahasan ini akan dibagi ke dalam dua pokok bahasan utama, yakni yang pertama membahas tentang “Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir” dan yang kedua membahas tentang “Faktor penghambat yang terdapat di dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Melalui Rantai Nilai Produksi Kelapa di Kabupaten indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang menghasilkan komoditi kelapa terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa rakyat merupakan sektor perkebunan unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dibuktikan dengan hampir 70% masyarakat yang ada di

Kabupaten Indragiri Hilir bermata pencaharian sebagai Petani Kelapa. Dimana Petani Kelapa dalam kehidupan sehari-harinya sangat bergantung pada hasil perkebunan kelapanya seperti pemenuhan pangan, sandang dan papannya.

Namun, meskipun kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang menghasilkan kelapa terbesar di Indonesia, ini tidak menjamin bahwa masyarakat Indragiri Hilir khususnya Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan peningkatan tingkat kesejahteraan, ini dikarenakan berbagai permasalahan yang terdapat di dalam rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat kesejahteraan Petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti : permasalahan produksi hingga permasalahan monopoli atau monopoli harga yang dilakukan oleh pedagang pengumpul (tauke) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga melalui permasalahan kesejahteraan petani kelapa ini, maka diperlukanlah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana dalam hal ini upaya merupakan usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dan dalam melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui rantai nilai produksi kelapa itu sendiri harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memang bertanggung jawab dalam masalah perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dari itu selanjutnya penulis akan menguraikan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah sebagai Regulator Struktur Input-Output

Upaya pemerintah sebagai regulator struktur input-output merupakan

salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana upaya tersebut dilakukan dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan rantai nilai produksi kelapa yang mempengaruhi penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga kelapa yang menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur alur distribusi pengolahan kelapa sehingga diperoleh keseimbangan dan dapat menjaga kestabilan harga kelapa ditingkat yang wajar dan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Perda Tata Niaga Kelapa ini juga ditujukan untuk menjaga mutu dan citra perkelapaan daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing serta nilai tambah kelapa daerah dalam pasar nasional maupun pasar internasional sebagai perwujudan daerah hamparan kelapa dunia.

Upaya pemerintah daerah sebagai regulator struktur input-output rantai nilai produksi kelapa juga terdapat pada Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Excavator Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan Yang Dikelola Pemerintah Kecamatan Secara Swakelola dan Swadaya.

Peraturan ini dibuat karena melihat banyaknya permasalahan produksi kelapa yang terdapat pada struktur input-output rantai nilai produksi kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini dilihat dari banyaknya perkebunan kelapa rakyat yang rusak akibat intuisi air laut dan ketidak tahuan masyarakat dalam menanggulangi

permasalahan ini, sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menyelamatkan perkebunan rakyat yang rusak. Banyaknya kerusakan perkebunan dapat mempengaruhi kualitas produksi perkebunan kelapa yang mana buruknya kualitas produksi kelapa dapat berdampak kepada harga dari produksi kelapa yang mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa karena permasalahan ini. Dan dengan adanya peraturan bupati ini juga ditujukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memperbaiki Trio Tata Air kebun kelapa rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017. Upaya pemerintah sebagai regulator struktur input-output rantai nilai produksi kelapa dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa juga terdapat pada peraturan No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Dimana peraturan ini ditujukan agar petani memiliki kekuatan daya tawar yang tinggi ketika menjual kelapanya kepada pembeli yang pada akhirnya memberikan keuntungan kepada petani kelapa dan sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan harga jual komoditas kelapa sehingga petani kelapa memiliki patokan harga jual komoditas kelapa yang jelas dan petani aka terhindar dari monopoli harga yang biasanya dilakukan oleh tengkulak (tauke) serta sesuai dengan pasaran yang berlaku sehingga dapat menguntungkan petani kelapa yang berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan petani kelapa.

Sehingga dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah ada ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam produksi input-output rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Upaya Pemerintah sebagai Fasilitator *Upgrading*

Salah satu hal yang mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kualitas dari produksi kelapa itu sendiri, dimana jika kualitas produksinya bagus dan stabil maka pendapatan petani kelapa juga akan ikut stabil. Selain itu, dengan adanya suatu inovasi baru seperti pengolahan produksi kelapa yang menambah nilai guna dari kelapa itu sendiri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Oleh karena itu muncullah upaya pemerintah sebagai fasilitator *upgrading*. Yang mana upaya pemerintah sebagai fasilitator *upgrading* adalah pemerintah daerah menciptakan kondisi yang kondusif dan memfasilitasi suatu kegiatan *upgrading*. Dimana *upgrading* merupakan suatu upaya atau strategi yang dilakukan untuk menginovasi suatu produk, menambah suatu nilai produk, upaya untuk meningkatkan produk serta meningkatkan keahlian dan keterampilan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan adapun upaya pemerintah sebagai fasilitator *upgrading* adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan tanggul dan normalisasi parit perkebunan kelapa rakyat.

Pembuatan tanggul dan normalisasi parit bertujuan untuk menghalangi air laut yang masuk ke dalam perkebunan kelapa rakyat yang dapat merusak perkebunan sehingga menyebabkan penurunan kualitas produksi kelapa rakyat dan berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa.

Dimana Pada prosesnya pembuatan tanggul dan normalisasi parit perkebunan kelapa rakyat ini dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah bersama pemerintah kecamatan dengan memberikan 1 kecamatan 1 excavator.

b. Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat.

Kegiatan peremajaan kelapa ini dilakukan setelah dibangunnya tanggul

mekanik dan normalisasi parit perkebunan kelapa rakyat agar kegiatan peremajaan tidak terganggu oleh intuisi air laut. Kegiatan peremajaan ini dilkakukan untuk meningkatkan kualitas produksi kelapa agar dapat bersaing di pasar internasional dan meningkatkan volume ekspor buah kelapa sehingga dengan begitu harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir akan menjadi lebih baik, dan berdampak pada pendapatan petani kelapa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dimana peremajaan kelapa ini dilakukan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan memberikan bibit unggul kelapa kepada para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu bibit unggul kelapa sri gemilang yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul baru pada tahun 2016 dan pemberian bibit unggul ini juga dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Pengolahan Produksi Kelapa Untuk Mewujudkan Nilai Guna Serta Harga yang Wajar.

Selain meningkatkan kualitas produksi kelapa, upaya pemerintah sebagai fasilitator *upgrading* guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa juga dilakukan dengan menambah nilai guna produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini ditujukan agar para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan harga yang wajar sesuai dengan keinginan mereka sehingga petani kelapa mendapatkan keuntungan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengolahan kelapa ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan mencari kelompok-kelompok tani yang memang memiliki keinginan yang kuat serta niat yang kuat untuk melakukan pengolahan kelapa tersebut. Sehingga setelah didapatkannya

kelompok-kelompok tani tersebut maka dinas perkebunan kabupaten Indragiri Hilir melakukan pembinaan untuk pengolahan kelapa. Yang mana kelompok-kelompok tani tersebut dibina untuk membuat berbagai olahan hasil produksi kelapa seperti kopra putih, kripik dari daging buah kelapa, serta minyak VCO.

Dimana untuk menunjang kegiatan proses pengolahan kelapa oleh kelompok tani kelapa maka diberikanlah bantuan mesin oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir serta bantuan perizinan dan pemasaran produk.

d. Pelatihan Petani Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelatihan petani kelapa merupakan salah satu bagian dari upaya Pemerintah Daerah sebagai fasilitator *Upgrading*, dimana pelatihan petani ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis pertanian agar upaya pemerintah sebagai fasilitator *upgrading* berjalan dengan lancar. Dan pelatihan petani kelapa ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait yaitu ; Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir. Dan pelatihan petani kelapa ini sejalan dengan diberikannya bantuan kepada para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Upaya Pemerintah sebagai Fasilitator Pemutus Rantai Nilai Pedagang Pengumpul (Tauke)

Salah satu penyebab harga yang diterima oleh petani kelapa menjadi lebih rendah daripada yang semestinya yang menyebabkan para petani kelapa mengalami kerugian yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah adanya suatu rantai nilai pedagang pengumpul (tauke) yang berada di tengah-tengah antara rantai nilai petani dan perusahaan.

Dan untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah upaya pemerintah sebagai fasilitator pemutus rantai nilai pedagang pengumpul (tauke). dimana upaya ini memiliki pengertian pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif dan memfasilitasi suatu upaya untuk memutus rantai nilai pedagang pengumpul (tauke) yang selama ini menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di setiap desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Bumdes inilah yang menjadi solusi agar disparitas harga perusahaan dan di pedagang pengumpul tidak terlalu jauh berbeda.

Pembentukan Bumdes ini dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera membentuk Bumdes melalui surat edaran yang ditujukan kepada camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama mewujudkan keberadaan Bumdes.

Yang mana dalam pemanfaatan Bumdes untuk memutus rantai nilai pedagang pengumpul (tauke) tersebut dilakukan dengan cara, Bumdes yang ada di desa tersebut menggantikan peran dari pedagang pengumpul (tauke) sehingga petani kelapa tidak lagi menjual kelapa mereka kepada pedagang pengumpul (tauke) melainkan para petani menjual kelapa mereka ke Bumdes yang sudah disediakan di desa mereka masing-masing. Yang mana dalam menggantikan peran pedagang pengumpul (tauke), Bumdes yang ada di desa melakukan penampungan hasil produksi kelapa petani di desa tersebut, dan dalam proses penampungan hasil produksi kelapa ini dilakukanlah sortir oleh Bumdes dengan menyortir kelapa-kelapa yang memiliki kualitas unggul, yang kemudian kelapa yang telah disortir ini akan dijual ke perusahaan dan sebagian lagi diolah menjadi produk olahan turunan kelapa.

4. Upaya Pemerintah sebagai Dinamisator Stakeholder.

Dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa pada produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka diperlukanlah keterlibatan atau partisipasi dari stakeholder pada rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri hilir dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka diadakanlah upaya pemerintah sebagai dinamisator stakeholder.

Dimana upaya ini dimaksud dengan pemerintah menjalin koordinasi, meningkatkan partisipasi dan mendorong kontribusi dari petani dan perusahaan yang merupakan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tahapan rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana dalam mewujudkan partisipasi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, musyawarah agar stakeholder yang terlibat mau ikut serta atau berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Seperti, meminta para petani kelapa untuk ikut serta dalam menjaga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap peningkatan kualitas buah kelapa, ikut serta dalam pembangunan tanggul dengan memberikan akses jalannya excavator dengan membuat jalan dari batang-batang kelapa yang sudah tidak produktif lagi.

Selain petani, perusahaan tentu juga dibutuhkan partisipasi yaitu dengan menyediakan alat berat untuk pembangunan tanggul dan bantuan lainnya yang dapat mempermudah pekerjaan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

B. Faktor Penghambat yang Terdapat di dalam Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat yang terdapat di dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu diantaranya :

1. Anggaran

Anggaran sangat berperan penting dalam mensukseskan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir ini, karena dengan anggaran yang dialokasikan dapat menentukan keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Dimana dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir anggaran yang dialokasikan masih minim.

2. Sumber Daya Manusia

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan berjalan dengan baik apabila semua sumber daya manusia khususnya petani ikut serta atau berpartisipasi dalam mensukseskan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, dimana kenyataannya sumber daya manusia khususnya petani kelapa yang ikut serta atau berpartisipasi dalam mensukseskan upaya Pemerintah ini masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan petani, karena rata-rata petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir hanya memiliki tamatan SMP dan SMA. Dan juga para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir umumnya tidak terlalu menyukai proses yang panjang karena menurut mereka itu merepotkan, dan ini diakui oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah petani yang ingin diberi pelatihan atau diberdayakan pada tahun 2018 hanya

berkisar 103 orang dan pada tahun 2019 hanya berjumlah 149 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. selain itu, jumlah sumber daya penyuluh yang terbatas yakni hanya berjumlah 7 orang menyebabkan penyuluhan yang dijalankan oleh penyuluh kurang intensif sehingga membuat sangat sedikitnya petani yang sadar akan pentingnya menjaga kualitas kelapa dan pengolahan produk kelapa demi meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam berjalannya suatu kegiatan.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi alat penunjang dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan dapat dicapai. Dimana sarana dan prasarana juga merupakan salah satu syarat penunjang strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menstabilkan harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Yang mana kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir masih dikatakan terbatas, ditambah dengan kondisi wilayah yang sulit berkorelasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Kondisi sarana dan prasarana seperti: terbatasnya jumlah mesin pengolahan kelapa yang hanya berjumlah 4 mesin saja, yang mana 2 buah mesin merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan 2 mesin lainnya merupakan bantuan dari Kemendes RI. Dan kondisi jalan serta jembatan yang kurang baik ditambah dengan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan upaya Pemerintah Daerah contohnya saja dalam proses pembangunan tanggul untuk meningkatkan kualitas produksi kelapa demi tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan petani

kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kondisi ini disebabkan karena minimnya anggaran dan keseriusan pemerintah itu sendiri dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk melancarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan dari penelitian upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun kesimpulan tersebut yaitu :

1. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui rantai nilai produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau maka diadakanlah beberapa upaya oleh Pemerintah daerah yaitu diantaranya:
 - a. Upaya Pemerintah sebagai Regulator Struktur Input-Output yang dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa, Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Excavator untuk Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang Dikelola Pemerintah Kecamatan secara Swakelola dan Swadaya, dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Sistem Resi gudang.
 - b. Upaya Pemerintah sebagai Fasilitator *Upgrading* yang dilakukan dengan pembuatan tanggul dan normalisasi parit perkebunan kelapa rakyat, peremajaan perkebunan kelapa rakyat, pengolahan produksi kelapa untuk mewujudkan nilai

guna serta harga yang wajar serta melakukan pelatihan petani kelapa.

- c. Upaya Pemerintah sebagai Fasilitator Pemutus Rantai Nilai Pedagang Pengumpul (Tauke) yang dilakukan dengan mendirikan serta memanfaatkan Bumdes di setiap desa yang berperan sebagai pengganti peran pedagang pengumpul (tauke) agar petani tidak lagi menjual kelapa mereka kepada pedagang pengumpul (tauke) sehingga monopoli harga yang biasanya dilakukan oleh tauke yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan petani kelapa dapat teratasi.
- d. Upaya Pemerintah sebagai Dinamisator Stakeholder dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, musyawarah dan menggandeng stakeholder untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Dan untuk pelaksanaan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa ini memang perlu ditingkatkan lagi agar upaya yang dilaksanakan menjadi optimal sehingga hasil yang didapatkan oleh Pemerintah dan Para Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir juga ikut maksimal.

2. Adapun faktor penghambat yang terdapat dalam upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: masih minimnya anggaran yang alokasikan dalam upaya yang dilakukan pemerintah, kurangnya sumber daya manusia khususnya petani kelapa, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat

menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Saran

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lebih meningkatkan alat-alat yang digunakan di dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir seperti salah satu contohnya yaitu mesin pengolahan kelapa yang jumlahnya masih sangat terbatas sehingga dengan ditingkatkannya alat-alat seperti ini maka upaya pemerintah sebagai fasilitator *upgrading* pada pengolahan produksi kelapa untuk mewujudkan nilai guna serta harga yang wajar menjadi optimal. Selain itu, dalam hal pemasarannya juga perlu dikembangkan lagi agar penjualan hasil pengolahan kelapa ini bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia bahkan ke pasar Internasional.
2. Hendaknya alokasi dana yang diberikan untuk upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir ditambah lagi, agar tidak ada lagi permasalahan atau faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan upaya Pemerintah tersebut. Serta perlu ditambah lagi partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan dan melakukan penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana agar dapat melancarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Daftar Pustaka

Buku

- Arenawati. (2013). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Serang: Graha Ilmu.
- James A. Caporaso, D. P. (2018). *Teori-teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stark, G. G. (2016). *Global Value Chains Analysis : A Primer 2nd Edition*. Durham, North Carolina, USA: Duke University.
- Starks, G. G. (2011). *Global Value Chain Analysis : A Primer*. USA: Duke University.
- Trienekens, M. P. (2012). *Global Value Chains Linking Local Producer From Developing Countries to International Markets*. Amsterdam : Amsterdam University Press.

Jurnal

- Adnan Engelen, Rusthtamin H. Akuba. *Analisis rantai nilai kakao di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo*. Jtech 2016.
- Akbar Alfa & Syafrizal Taher. *Peran Serta Program Cooperate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kelapa Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Bappeda, Vol. 3. No.1, April 2017.
- Asri Rachmat Rosidi, Siti Asmaul Mustaniroh, Panji Doeranto. *Perencanaan strategi pengembangan argoindustri kopra (studi kasus Halmahera Timur*. Jurnal Teknologi Pertanian. Vol 18 No. 13 Desember 2017.
- Kholis Kurniawan. *Analisis global value chain produk daerah istimewa Yogyakarta*. universitas Gadjah Mada. 2017.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad Iqbal & Herman. *Pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap pembangunan masyarakat di kabupaten indragiri hilir*. jurnal wedana, volume IV No 1 April 2018.

Rosmaladewi, O. (2018). *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Vional Zulfia, Fajroji, Rachmiwati Yusuf. *Pengembangan produk hilirisasi kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2017.

Badan Pusat Statistik 2020.

Badan Pusat Statistik.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa

Web Site

Tribun pekanbaru.com “pasar kelapa kembali direbut filipina jadi sebab anjloknya harga kelapa Inhil”.26 Juni 2018. Akses 2 November 2019. (<https://pekanbaru.tribunnew.com/amp/2018/06/26/pasar-kelapa-kembali-direbut-filipina-jadi-sebab-anjloknya-harga-kelapa-inhil>)